

DARI PEMBERONTAKAN HINGGA DIPLOMASI: Menggali Peran Ulama dalam Politik Modern di Indonesia

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email Koresponden: arifsugitanata@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the role of the ulama in modern politics in Indonesia, focusing on the dynamics from rebellion to diplomacy. The research also analyzes the role of ulama using the political elite theories of Vilfredo Pareto and Gaetano Mosca to provide a new perspective on the power and influence of ulama in Indonesian politics. The methodology used is a literature review with a qualitative research approach, utilizing primary data from authoritative books, journals, and online sources. The results show that the ulama has a significant role in various aspects of Indonesian politics. In the early post-independence period, ulama such as Kyai Haji Hasyim Asy'ari played a role in mass mobilization against colonialists, while ulama like Abdurrahman Wahid (Gus Dur) used diplomatic strategies to maintain their influence despite efforts by the government to depoliticize religion. After the reform era, ulama gained a more significant space in politics, both through Islamic-based political parties and in their roles as advisors and mediators. The study also reveals that the ulama plays a crucial role in shaping public policies that reflect Islamic values. Fatwas issued by the Indonesian Ulama Council (MUI) often influence government policies in various fields, such as Sharia economics. Furthermore, ulama is involved in political education for the public, advocacy for marginalized groups, and participation in interfaith dialogue at international forums. Analysis based on Pareto and Mosca's political elite theories indicates that ulama is part of the elite holding moral and spiritual power and functions as advisors and mediators in practical politics. The process of elite circulation and the importance of religious organizations in maintaining their power highlight how the ulama continuously adapts and functions within the dynamic political power structure in Indonesia. With their long history of contribution and adaptation, ulama in Indonesia is poised to continue being a significant pillar in shaping the nation's political and social future.

Keywords: Rebellion; Diplomacy; Ulama; Modern Politics; Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ulama dalam politik modern di Indonesia, dengan fokus pada dinamika dari pemberontakan hingga diplomasi. Penelitian ini juga menganalisis peran ulama menggunakan teori

elite politik Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca untuk memberikan perspektif baru mengenai kekuatan dan pengaruh ulama dalam politik Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif, menggunakan data primer dari buku, jurnal, dan sumber daring otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama memiliki peran signifikan dalam berbagai aspek politik Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, ulama seperti Kyai Haji Hasyim Asy'ari berperan dalam mobilisasi massa melawan penjajah, sementara ulama seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menggunakan strategi diplomasi untuk mempertahankan pengaruh mereka meskipun ada upaya depolitisasi agama oleh pemerintah. Setelah era reformasi, ulama mendapatkan ruang lebih besar dalam politik, baik melalui partai politik berbasis Islam maupun dalam peran mereka sebagai penasehat dan mediator. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ulama memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali mempengaruhi kebijakan pemerintah di berbagai bidang, seperti ekonomi syariah. Selain itu, ulama terlibat dalam pendidikan politik masyarakat dan advokasi bagi kelompok-kelompok marginal, serta berpartisipasi dalam dialog antaragama di forum internasional. Analisis berdasarkan teori elite politik Pareto dan Mosca menunjukkan bahwa ulama merupakan bagian dari elite yang memegang kekuasaan moral dan spiritual, serta berfungsi sebagai penasehat dan mediator dalam politik praktis. Proses sirkulasi elite dan pentingnya organisasi keagamaan dalam mempertahankan kekuasaan mereka menyoroti bagaimana ulama terus beradaptasi dan berfungsi dalam struktur kekuasaan politik yang dinamis di Indonesia. Dengan sejarah panjang kontribusi dan adaptasi mereka, ulama di Indonesia siap untuk terus menjadi pilar penting dalam membentuk masa depan politik dan sosial bangsa.

Kata Kunci : Pemberontakan; Diplomasi; Ulama; Politik Modern; Indonesia

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received : 05/05/2023	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/j
Approved : 21/06/2023	urdar

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sejarah panjang dan kompleks dalam hal hubungan antara agama

dan politik.¹ Ulama, sebagai pemuka agama dan pemimpin spiritual, memainkan peran penting dalam dinamika politik Indonesia.² Peran ulama dalam politik modern di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan mereka untuk keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan bangsa.³ Perubahan dan adaptasi peran ini mencerminkan dinamika sosial dan politik Indonesia yang terus berkembang, menjadikan ulama sebagai aktor penting dalam panggung politik nasional dan internasional.⁴

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa ulama memiliki pengaruh signifikan dalam berbagai aspek politik, dari pemberontakan hingga diplomasi. Penelitian oleh Imam Yahya dan Sahidin menunjukkan bahwa ulama di pesantren menggunakan prinsip-prinsip fiqh untuk terlibat dalam politik, baik untuk mendapatkan kekuasaan, menyebarkan nilai-nilai Islam, maupun menunjukkan eksistensi mereka dalam administrasi negara.⁵ Sementara itu, studi oleh Krzysztof Trzcinski menyoroti peran partai-partai Islam dalam sistem politik Indonesia, yang dibuat untuk memenuhi kepentingan komunitas Islam berdasarkan prinsip dan nilai-nilai agama.⁶ Kemudian Jeremy Matthew Menchik membahas otoritas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang telah menjadi aktor penting melalui berbagai strategi politik.⁷ Adang Sonjaya meneliti hubungan antara agama dan kekuasaan, menunjukkan bahwa agama sering menjadi inti kekuasaan di Indonesia.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu dan dikemukakan di atas dengan

¹ Saiful Mujani, *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

² Hasanatul Jannah, "Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan," *Fikrah* 3, no. 1 (2015): 157–76, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/download/1831/1599>.

³ Jajat Burhanudin, *Ulama dan kekuasaan: Pergumulan elite politik muslim dalam sejarah Indonesia* (Jakarta: NouraBooks, 2012).

⁴ Henny Yusalia, "Ulama dan Politik Tinjauan Peran Abdurrahman Wahid dalam Perpolitikan Indonesia," *Wardah* 12, no. 1 (2011): 19–33, <https://doi.org/10.19109/wardah.v12i1.229>.

⁵ Imam Yahya dan Sahidin, "Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia," *Theological Studies/Teologiese Studies* 78, no. 4 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7405>.

⁶ Krzysztof Trzcinski, "Znaczenie partii islamskich i chrześcijańskich w Indonezji," *Studia Politologiczne* 66, no. 4 (2022): 350–77.

⁷ Jeremy Matthew Menchik, "The Politics of the Fatwa: Islamic Legal Authority in Modern Indonesia" 114, no. 1 (2022): 75–97, <https://doi.org/10.1353/ind.2022.0012>.

⁸ Adang Sonjaya, "Relasi Agama dan Politik di Indonesia," *JCIC* 5, no. 1 (2023): 21–28, <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.82>.

mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana peran ulama dalam politik modern di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek dari pemberontakan hingga diplomasi. Kedua, bagaimana analisis berdasarkan teori elite politik Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca dapat memberikan wawasan baru mengenai peran ulama dalam politik modern Indonesia.

Teori Elite Politik yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca menawarkan perspektif yang menarik untuk menganalisis peran ulama dalam politik Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat, kekuasaan politik pada akhirnya dipegang oleh sekelompok kecil elite. Menurut Pareto, elite terdiri dari individu-individu yang paling mampu dalam masyarakat, sedangkan Mosca menekankan bahwa kelas yang memerintah selalu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kelas yang diperintah. Dengan menerapkan teori ini, penulis dapat mengeksplorasi bagaimana ulama, sebagai bagian dari elite, memanfaatkan posisi mereka untuk mempengaruhi politik dan bagaimana mereka menjaga dan memperluas kekuasaan mereka dalam konteks politik yang dinamis. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi ulama dalam membentuk dinamika politik Indonesia serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung dalam sistem politik dan sosial.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan langkah penting dalam menggali peran ulama dalam dinamika politik modern Indonesia, khususnya dari perspektif historis hingga peran mereka dalam diplomasi saat ini. Melalui metode studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini menitikberatkan dua rumusan masalah utama yang membingkai analisis mendalam. Pertama, bagaimana ulama telah berperan dalam mengelola politik modern di Indonesia sejak era pemberontakan hingga peran mereka dalam ranah diplomasi yang semakin kompleks saat ini. Kedua, dengan mengadopsi pandangan dari teori elite politik Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, penelitian ini juga mengarah pada analisis kritis terhadap posisi serta pengaruh ulama dalam dinamika politik modern Indonesia. Data primer yang menjadi pondasi penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang otoritatif, seperti buku-buku terkait, jurnal-jurnal yang relevan, dan website-website yang memiliki informasi terkini seputar peran ulama dalam politik. Analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitik, menggali setiap sudut pandang dengan menggunakan

pisau bedah teori elite politik Pareto dan Mosca. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas peran ulama dalam konteks politik modern Indonesia.

Pembahasan

Memetakan Konstruksi Perpolitikan Indonesia

Konstruksi perpolitikan di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, yang dibentuk oleh sejarah panjang, dinamika sosial, dan perubahan konstitusional yang signifikan. Secara historis, Indonesia mengalami berbagai bentuk pemerintahan mulai dari kerajaan-kerajaan tradisional, penjajahan kolonial oleh Belanda, hingga kemerdekaan dan pembentukan negara modern dengan sistem demokrasi Pancasila.⁹ Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memasuki fase awal demokrasi parlementer yang ditandai dengan keragaman partai politik dan kebebasan berekspresi. Namun, periode ini tidak berlangsung lama karena ketidakstabilan politik yang kemudian mendorong munculnya era Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno.¹⁰

Pada masa Orde Lama, Soekarno mengedepankan konsep Demokrasi Terpimpin yang berujung pada sentralisasi kekuasaan dan pembatasan aktivitas partai politik. Setelah itu, terjadi transisi ke Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Orde Baru memperkenalkan stabilitas politik melalui kontrol ketat terhadap partai politik dan media, serta menekankan pembangunan ekonomi. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan berbagai masalah seperti korupsi yang meluas, pelanggaran hak asasi manusia, dan terbatasnya kebebasan politik.¹¹

⁹ Yudi Armansyah, “Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern,” *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 27–46, <https://www.academia.edu/download/74716059/pdf.pdf>.

¹⁰ Else Suhaimi, “EKSISTENSI MULTIPARTAI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 2, no. 1 (2017): 17–23, <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.647>.

¹¹ Abdul Majid dan Arif Sugitanata, “Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.18>.

Reformasi tahun 1998 menandai perubahan signifikan dalam konstruksi perpolitikan Indonesia. Era reformasi membuka jalan bagi demokrasi yang lebih inklusif dengan amandemen konstitusi yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden, desentralisasi kekuasaan ke daerah, serta pemilihan umum yang bebas dan adil. Selain itu, munculnya berbagai partai politik baru dan kebebasan pers memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat.¹²

Sistem pemilihan umum di Indonesia juga mengalami berbagai perubahan untuk meningkatkan representasi dan keadilan. Pemilu legislatif dan presiden yang dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya politik.¹³ Sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih kandidat secara langsung, yang diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituen mereka.¹⁴

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan setelah reformasi juga membawa perubahan signifikan dalam struktur politik Indonesia. Kebijakan ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Namun, desentralisasi juga menghadirkan tantangan baru seperti korupsi di tingkat lokal dan inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah.¹⁵

Secara keseluruhan, konstruksi perpolitikan Indonesia adalah hasil dari proses evolusi yang panjang dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Meskipun telah mencapai banyak kemajuan dalam memperkuat sistem demokrasi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan stabilitas politik, keadilan sosial, dan

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018).

¹³ Ratnia Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik," *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73–88, <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.

¹⁴ Arif Sugitanata, "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 127–46, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.

¹⁵ Kristian Widya Wicaksono, "Problematisasi dan tantangan desentralisasi di Indonesia," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 4, no. 1 (2012): 21–28, <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>.

pemerintahan yang bersih dan efektif.¹⁶ Upaya terus-menerus diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan untuk membangun demokrasi yang matang dan inklusif.

Peran Ulama dalam Politik Modern di Indonesia: Dari Pemberontakan hingga Diplomasi

Ulama adalah para ahli agama Islam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu-ilmu keislaman, termasuk tafsir Al-Qur'an, hadis, fiqh, dan akhlak.¹⁷ Mereka adalah individu yang dihormati dan diakui oleh masyarakat karena kepakaran dan kebijaksanaan mereka dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam.¹⁸ Ulama berperan sebagai pemimpin spiritual, pendidik, dan penasehat, serta seringkali menjadi otoritas moral dalam komunitas Muslim. Mereka berfungsi sebagai penjaga tradisi keagamaan dan sering kali terlibat dalam isu-isu sosial dan politik, menggunakan pengaruh mereka untuk membimbing umat dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.¹⁹

Peran ulama dalam politik modern di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan dari masa kolonial hingga era reformasi.²⁰ Pada masa awal kemerdekaan, ulama memainkan peran penting dalam mobilisasi massa dan perjuangan melawan penjajah. Mereka menggunakan pengaruh keagamaan untuk memobilisasi dukungan rakyat dalam upaya mencapai

¹⁶ Arif Sugitanata dkk., "INTEGRASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN OTORITER DI NEGARA BARU MERDEKA (2)," *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.74>.

¹⁷ Andi Muhammad Akmal, "Konsepsi Ulama Dalam Alquran," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 174–82, <https://doi.org/10.59638/ash.v4i2.194>.

¹⁸ Maulana Janah, "Transfer Kapital: Studi Praktik Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat," *Jurnal Sosiologi Agama* 17, no. 1 (2023): 65–86, <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.171-05>.

¹⁹ Hasanatul Jannah dan Danang Purwanto, "Tèngka tradition in Madura: Constructive role of ulama as religious and cultural leaders," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 7, no. 1 (2022): 43–54, <https://doi.org/10.22515/shahih.v7i1.5201>.

²⁰ Okrisal Eka Putra, "Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik di Indonesia," *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 13, no. 1 (2016): 67–80, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/5>.

kemerdekaan.²¹ Salah satu contoh yang menonjol adalah peran Kyai Haji Hasyim Asy'ari sebagai salah satu tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Revolusi Nasional Indonesia. NU, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, memberikan legitimasi moral dan dukungan logistik bagi para pejuang kemerdekaan, yang menunjukkan bahwa peran ulama tidak terbatas pada bidang spiritual saja, tetapi juga mencakup aspek politik dan sosial.²²

Pada era Orde Baru, peran ulama dalam politik mengalami perubahan signifikan. Hal tersebut terlihat ketika pemerintahan Soeharto berusaha mengkooptasi dan mengontrol ulama melalui kebijakan depolitisasi agama, mengarah pada hubungan yang kompleks antara negara dan agama.²³ Meskipun demikian, beberapa ulama tetap berhasil mempertahankan pengaruh politik mereka. Mereka sering kali menggunakan strategi diplomasi untuk menjaga hubungan dengan pemerintah sambil tetap memperjuangkan kepentingan umat. Ulama seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang kemudian menjadi Presiden Indonesia, memainkan peran ganda sebagai pemimpin spiritual dan politik, menunjukkan bahwa ulama mampu beradaptasi dengan dinamika politik modern.²⁴

Setelah jatuhnya Soeharto dan dimulainya era reformasi, ulama kembali mendapatkan ruang yang lebih besar dalam kancah politik Indonesia. Reformasi membuka jalan bagi partisipasi politik yang lebih luas, termasuk bagi organisasi keagamaan dan para ulama.²⁵ Ulama kini terlibat secara langsung dalam politik praktis, baik melalui partai politik berbasis Islam²⁶ maupun dalam peran mereka sebagai penasehat dan mediator.²⁷

²¹ Kevin W Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia* (Jakarta: Noura Books, 2020).

²² Lathiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA, 2000).

²³ BEM Kema Unpad, "Soeharto dan Dimensi Islam dalam Konstelasi Politik Rezim Orde Baru," *BEM Kema Unpad* 2023, 8 Juni 2018, <https://kema.unpad.ac.id/soeharto-dan-dimensi-islam-dalam-konstelasi-politik-rezim-orde-baru/>.

²⁴ Yusalia, "Ulama dan Politik Tinjauan Peran Abdurrahman Wahid dalam Perpolitikan Indonesia."

²⁵ Jungjungan Simorangkir, "Islam Pasca Orde Baru," *Istinbath* 15, no. 2 (2015): 199–216, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/794/0>.

²⁶ Muhammad Nuh Rasyid, "Kapasitas Ulama Dalam Bernegara," *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2019): 590–97, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar/article/view/1113>.

Contohnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sering kali menjadi rujukan dalam berbagai isu politik dan sosial,²⁸ menunjukkan bahwa peran ulama dalam politik modern Indonesia tidak hanya sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai aktor politik yang berpengaruh. Selain itu, ulama modern di Indonesia juga memainkan peran penting dalam diplomasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.²⁹ Mereka sering kali terlibat dalam dialog antaragama dan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam isu-isu sensitif seperti terorisme, radikalisme, dan perdamaian. Peran diplomatik ini menunjukkan bahwa ulama memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian, memanfaatkan otoritas moral dan pengetahuan keagamaan mereka untuk mempromosikan stabilitas dan harmoni.³⁰

Lebih lanjut, peran diplomatik dan keterlibatan langsung dalam politik praktis, ulama di Indonesia juga berperan dalam pembentukan kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Sebagai contoh, berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial.³¹ Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam, tetapi juga sebagai instrumen politik yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Misalnya, fatwa mengenai ekonomi syariah telah

²⁷ Muhammad Sahlan dkk., “Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh,” *Society* 7, no. 2 (2019): 271–88, <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106>.

²⁸ Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949579&val=14663&title=PERANAN%20FATWA%20DEWAN%20SYARIAH%20NASIONAL%20MAJELIS%20ULAMA%20INDONESIA-%20TERHADAP%20HUKUM%20POSITIF%20INDONESIA>.

²⁹ Andi Purwono, “Diplomasi Kiai Nahdlatul ‘Ulama (NU) Melalui Konferensi Ulama Internasional,” *Sosio Dialektika* 5, no. 2 (2020): 194–215, <https://doi.org/10.31942/sd.v5i2.3875>.

³⁰ Arif Sugitanata dkk., “Building Harmony In Diversity: Exploring Masnun Tahir’s Perspective on Multicultural Fiqh,” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 47–57, <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.346>.

³¹ Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 62–78, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.

mendorong pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia, yang kini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional.³²

Kemudian, ulama juga terlibat dalam pendidikan politik masyarakat melalui dakwah dan pendidikan formal maupun non-formal.³³ Melalui pesantren dan madrasah, ulama menyebarkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab dan beretika.³⁴ Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, ulama berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar politik dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses demokratis.³⁵ Ulama juga memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok marginal. Mereka sering kali menjadi advokat bagi masyarakat miskin dan tertindas, menggunakan posisi mereka untuk memperjuangkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Peran ini terlihat jelas dalam berbagai aksi sosial dan politik yang diinisiasi oleh organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang sering kali berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.³⁶

Dalam konteks global, ulama Indonesia juga berpartisipasi dalam forum-forum internasional untuk memperjuangkan isu-isu yang relevan bagi umat Islam di seluruh dunia.³⁷ Mereka sering kali terlibat dalam dialog antaragama dan antarbudaya, mempromosikan perdamaian dan toleransi. Peran ini sangat penting dalam memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang berkomitmen pada nilai-nilai

³² Zaini Ibrahim, "Strategi mendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 1–15, <http://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/12>.

³³ Fatimah Zuhrah, "Pergeseran Peran dan Posisi Ulama pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura Kabupaten Langkat," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 12, no. 1 (2016): 83–106, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.58>.

³⁴ Mohammad Zakki, *Pesantren dan Pendidikan Karakter: menelusuri Rahasia dan Keunikan Budaya Pesantren* (Jawa Tengah: wawasan Ilmu, 2023).

³⁵ Muhammad Dafan Inanda, "Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

³⁶ Fuad Fathuruddin, *Agama dan pendidikan demokrasi: pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Jawa Barat: Pustaka Alvabet, 2006).

³⁷ Siswoyo Aris Munandar, "Peran dan Kontribusi KH Yahya Cholil Staquf dalam Pembangunan Islam Moderat di Indonesia dan di Dunia Internasional," *MIMIKRI* 9, no. 1 (2023): 168–85, <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/1034>.

demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Namun, peran ulama dalam politik modern Indonesia tidak tanpa tantangan. Mereka harus menghadapi dinamika politik yang kompleks dan sering kali berhadapan dengan tekanan dari berbagai pihak. Tantangan ini mencakup upaya untuk mempertahankan otonomi mereka dari intervensi politik, menjaga kredibilitas di mata masyarakat, dan menghindari politisasi agama yang dapat merusak persatuan nasional.³⁸ Meskipun demikian, ulama terus berusaha memainkan peran konstruktif dalam membangun bangsa dan mempromosikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Keberhasilan peran ulama dalam politik akan sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk menavigasi tantangan-tantangan baru dan tetap relevan dalam konteks yang terus berubah. Namun, dengan sejarah panjang kontribusi dan adaptasi mereka, ulama di Indonesia tampaknya siap untuk terus menjadi pilar penting dalam membentuk masa depan politik dan sosial bangsa ini.

Peran Ulama dalam Politik Modern Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Elite Politik Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca

Dalam konteks politik modern di Indonesia, peran ulama dapat dianalisis secara mendalam menggunakan teori Elite Politik yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. Kedua teori ini memberikan perspektif yang kaya dalam memahami bagaimana ulama, sebagai bagian dari elite agama, berfungsi dan berinteraksi dalam struktur kekuasaan politik di Indonesia. Vilfredo Pareto memperkenalkan konsep sirkulasi elite, yang menyatakan bahwa masyarakat selalu didominasi oleh elite yang kecil dan berpengaruh, sementara mayoritas populasi berada dalam posisi yang lebih rendah. Elite ini terus berganti melalui proses sirkulasi, di mana kelompok baru menggantikan yang lama melalui mekanisme seleksi alamiah dalam konteks sosial.³⁹

Dalam analisis Pareto, ulama di Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari elite yang memegang kekuasaan moral dan spiritual. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan karena keahlian mereka dalam ilmu-ilmu

³⁸ Muh Haras Rasyid, "ULAMA DI PERSIMPANGAN JALAN (Telaah Terhadap Peran Ulama dalam Kehidupan Politik di Indonesia)," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1 (2020): 48–56, <https://doi.org/10.59638/ash.v6i1.236>.

³⁹ John Higley dan Jan Pakulski, "Pareto's theory of elite cycles: a reconsideration and application," dalam *Vilfredo Pareto* (Routledge: Routledge, 2017), 111–30.

keislaman dan reputasi mereka di mata masyarakat. Ulama, seperti yang telah dijelaskan memainkan peran penting sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi dan seterusnya.⁴⁰ Mereka berfungsi tidak hanya sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai aktor politik yang berpengaruh.⁴¹ Proses sirkulasi elite terlihat jelas dalam sejarah politik Indonesia, di mana ulama terus menavigasi dan beradaptasi dengan perubahan politik. Pada masa awal kemerdekaan, ulama seperti Kyai Haji Hasyim Asy'ari menjadi figur kunci dalam mobilisasi massa melawan penjajah.⁴² Selama Orde Baru, ulama seperti Abdurrahman Wahid menggunakan strategi diplomasi untuk mempertahankan pengaruh mereka meskipun ada upaya depolitisasi agama oleh pemerintah Soeharto sebelumnya.⁴³ Era reformasi kemudian membuka ruang bagi ulama untuk kembali berpartisipasi secara lebih aktif dalam politik praktis, menunjukkan dinamika sirkulasi elite dalam konteks politik Indonesia.⁴⁴

Gaetano Mosca, di sisi lain, menekankan bahwa masyarakat selalu dibagi menjadi dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Menurut Mosca, elite politik adalah minoritas yang terorganisir dan terlatih yang memegang kekuasaan atas mayoritas yang tidak terorganisir. Kekuasaan elite ini tidak hanya berdasarkan pada kekuatan fisik tetapi juga pada kontrol mereka terhadap ideologi dan sumber daya lainnya.⁴⁵ Ulama di Indonesia dapat dianalisis sebagai bagian dari elite yang memerintah dalam konteks sosial dan politik. Mereka tidak hanya memegang kekuasaan spiritual tetapi juga berfungsi sebagai penasihat dan mediator dalam politik praktis.⁴⁶ Hal tersebut menunjukkan bagaimana ulama seperti anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempengaruhi kebijakan publik melalui fatwa-fatwa mereka.⁴⁷ Fatwa mengenai ekonomi syariah, misalnya, telah mendorong perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia,⁴⁸

⁴⁰ Putra, "Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik di Indonesia."

⁴¹ Fogg, *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*.

⁴² Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari*.

⁴³ Yusalia, "Ulama dan Politik Tinjauan Peran Abdurrahman Wahid dalam Perpolitikan Indonesia."

⁴⁴ Simorangkir, "Islam Pasca Orde Baru."

⁴⁵ Alan Zuckerman, "The Concept" Political Elite": Lessons from Mosca and Pareto," *The Journal of Politics* 39, no. 2 (1977): 324–44, <https://doi.org/10.2307/2130054>.

⁴⁶ Sahlan dkk., "Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh."

⁴⁷ Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia."

⁴⁸ Ibrahim, "Strategi mendorong pertumbuhan bank syariah di indonesia."

menunjukkan bagaimana ulama menggunakan otoritas moral mereka untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi. Mosca juga menekankan pentingnya organisasi dalam mempertahankan kekuasaan elite. Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan struktur dan legitimasi bagi ulama untuk berpartisipasi dalam politik. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi ulama untuk menyuarakan aspirasi umat tetapi juga sebagai mekanisme untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka dalam masyarakat.⁴⁹

Oleh karena itu, dalam kerangka teori Elite Politik Pareto dan Mosca, ulama di Indonesia dapat dilihat sebagai bagian integral dari elite yang memegang kekuasaan dalam bidang spiritual dan politik. Mereka memainkan peran penting dalam mobilisasi massa, advokasi kebijakan publik, dan mediasi dalam isu-isu sosial dan politik. Proses sirkulasi elite dan pentingnya organisasi dalam mempertahankan kekuasaan menunjukkan bagaimana ulama terus beradaptasi dan berfungsi dalam struktur kekuasaan politik yang dinamis di Indonesia. Dengan demikian, ulama tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai aktor politik yang berpengaruh, menunjukkan kompleksitas dan signifikansi peran mereka dalam membentuk masa depan politik dan sosial bangsa ini.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa peran ulama dalam politik modern di Indonesia memiliki dimensi yang kompleks dan berpengaruh, mencakup aspek spiritual, sosial, dan politik. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama yang dihormati tetapi juga sebagai aktor politik yang memainkan peran penting dalam berbagai periode sejarah Indonesia. Dari masa kolonial hingga era reformasi, ulama seperti Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Abdurrahman Wahid telah menunjukkan kemampuan mereka untuk memobilisasi massa, bernegosiasi dengan pemerintah, dan mempengaruhi kebijakan publik melalui otoritas moral dan spiritual mereka. Dalam konteks politik modern, ulama terus beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah, menggunakan strategi diplomasi dan partisipasi langsung dalam politik praktis untuk memperjuangkan kepentingan umat. Peran mereka tidak

⁴⁹ Fachruddin, *Agama dan pendidikan demokrasi: pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*.

hanya terbatas pada advokasi kebijakan publik melalui fatwa-fatwa tetapi juga mencakup pendidikan politik masyarakat, mediasi dalam isu-isu sosial, dan partisipasi dalam forum-forum internasional. Ulama memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai Islam, demokrasi, dan hak asasi manusia, menunjukkan bahwa mereka adalah aktor politik yang signifikan dalam membentuk masa depan bangsa.

Analisis peran ulama dalam politik Indonesia berdasarkan teori Elite Politik Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca menyoroti posisi mereka sebagai bagian dari elite yang memegang kekuasaan moral dan spiritual. Konsep sirkulasi elite Pareto menunjukkan bahwa ulama terus beradaptasi dan berganti peran dalam struktur kekuasaan, sementara Mosca menekankan pentingnya organisasi dalam mempertahankan kekuasaan elite. Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan legitimasi dan struktur bagi ulama untuk berpartisipasi dalam politik, memperluas pengaruh mereka dalam masyarakat. Secara keseluruhan, ulama di Indonesia memainkan peran yang multifaset dan penting dalam politik modern, menunjukkan kemampuan mereka untuk menavigasi tantangan politik dan tetap relevan dalam konteks yang terus berubah. Dengan sejarah panjang kontribusi mereka, ulama di Indonesia siap untuk terus menjadi pilar penting dalam membentuk masa depan politik dan sosial bangsa ini.

Daftar Pustaka

- Adang Sonjaya. "Relasi Agama dan Politik di Indonesia." *JCIC* 5, no. 1 (2023): 21–28. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.82>.
- Akmal, Andi Muhammad. "Konsepsi Ulama Dalam Alquran." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 174–82. <https://doi.org/10.59638/ash.v4i2.194>.
- Armansyah, Yudi. "Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 27–46. <https://www.academia.edu/download/74716059/pdf.pdf>.
- BEM Kema Unpad. "Soeharto dan Dimensi Islam dalam Konstelasi Politik Rezim Orde Baru." *BEM Kema Unpad* 2023, 8 Juni 2018. <https://kema.unpad.ac.id/soeharto-dan-dimensi-islam-dalam-konstelasi-politik-rezim-orde-baru/>.
- Burhanudin, Jajat. *Ulama dan kekuasaan: Pergumulan elite politik muslim dalam sejarah Indonesia*. Jakarta: NouraBooks, 2012.

- Fachruddin, Fuad. *Agama dan pendidikan demokrasi: pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jawa Barat: Pustaka Alvabet, 2006.
- Fogg, Kevin W. *Spirit Islam Pada Masa Revolusi Indonesia*. Jakarta: Noura Books, 2020.
- Habibaty, Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949579&val=14663&title=PERANAN%20FATWA%20DEWAN%20SYARIAH%20NASIONAL%20MAJELIS%20ULAMA%20INDONESIA-%20TERHADAP%20HUKUM%20POSITIF%20INDONESIA>.
- Higley, John, dan Jan Pakulski. “Pareto’s theory of elite cycles: a reconsideration and application.” Dalam *Vilfredo Pareto*, 111–30. Routledge: Routledge, 2017.
- Ibrahim, Zaini. “Strategi mendorong pertumbuhan bank syariah di indonesia.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 1–15. <http://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijei/article/view/12>.
- Imam Yahya dan Sahidin. “Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia.” *Theological Studies/Teologiese Studies* 78, no. 4 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7405>.
- Inanda, Muhammad Dafan. “Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Janah, Maulana. “Transfer Kapital: Studi Praktik Ulama Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.” *Jurnal Sosiologi Agama* 17, no. 1 (2023): 65–86. <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.171-05>.
- Jannah, Hasanatul. “Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan.” *Fikrah* 3, no. 1 (2015): 157–76. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/download/1831/1599>.
- Jannah, Hasanatul, dan Danang Purwanto. “Tèngka tradition in Madura: Constructive role of ulama as religious and cultural leaders.” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 7, no. 1 (2022): 43–54. <https://doi.org/10.22515/shahih.v7i1.5201>.

- Jeremy Matthew Menchik. "The Politics of the Fatwa: Islamic Legal Authority in Modern Indonesia" 114, no. 1 (2022): 75–97. <https://doi.org/10.1353/ind.2022.0012>.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Khuluk, Lathiful. *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA, 2000.
- Krzysztof Trzcinski. "Znaczenie partii islamskich i chrześcijańskich w Indonezji." *Studia Politologiczne* 66, no. 4 (2022): 350–77.
- Majid, Abdul, dan Arif Sugitanata. "Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.18>.
- Mujani, Saiful. *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Munandar, Siswoyo Aris. "Peran dan Kontribusi KH Yahya Cholil Staquf dalam Pembangunan Islam Moderat di Indonesia dan di Dunia Internasional." *MIMIKRI* 9, no. 1 (2023): 168–85. <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/1034>.
- Purwono, Andi. "Diplomasi Kiai Nahdlatul 'Ulama (NU) Melalui Konferensi Ulama Internasional." *Sosio Dialektika* 5, no. 2 (2020): 194–215. <https://doi.org/10.31942/sd.v5i2.3875>.
- Putra, Okrisal Eka. "Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik di Indonesia." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 13, no. 1 (2016): 67–80. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/5>.
- Rasyid, Muh Haras. "ULAMA DI PERSIMPANGAN JALAN (Telaah Terhadap Peran Ulama dalam Kehidupan Politik di Indonesia)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1 (2020): 48–56. <https://doi.org/10.59638/ash.v6i1.236>.
- Rasyid, Muhammad Nuh. "Kapasitas Ulama Dalam Bernegara." *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2019): 590–97. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar/article/view/1113>.
- Sahlan, Muhammad, Suci Fajarni, Siti Ikramatoun, Ade Ikhsan Kamil, dan Iromi Ilham. "Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Konflik di Aceh." *Society* 7, no. 2 (2019): 271–88. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106>.
- Simorangkir, Jungjungan. "Islam Pasca Orde Baru." *Istinbath* 15, no. 2 (2015): 199–216. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/794/0>.

- Solihah, Ratnia. “Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik.” *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73–88. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Sugitanata, Arif. “Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 127–46. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, Siti Khamidatus Sholikhah, dan Siti Aminah. “Building Harmony In Diversity: Exploring Masnun Tahir’s Perspective on Multicultural Fiqh.” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 47–57. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.346>.
- Sugitanata, Arif, Ahmad Mustakim, Lalu Hendri Nuriskandar, dan Elpipit Elpipit. “INTEGRASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN OTORITER DI NEGARA BARU MERDEKA (2).” *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.74>.
- Suhaimi, Else. “EKSISTENSI MULTIPARTAI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 2, no. 1 (2017): 17–23. <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.647>.
- Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 62–78. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.
- Wicaksono, Kristian Widya. “Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia.” *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 4, no. 1 (2012): 21–28. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>.
- Yusalia, Henny. “Ulama dan Politik Tinjauan Peran Abdurrahman Wahid dalam Perpolitikan Indonesia.” *Wardah* 12, no. 1 (2011): 19–33. <https://doi.org/10.19109/wardah.v12i1.229>.
- Zakki, Mohammad. *Pesantren dan Pendidikan Karakter: menelusuri Rahasia dan Keunikan Budaya Pesantren*. Jawa Tengah: wawasan Ilmu, 2023.
- Zuckerman, Alan. “The Concept" Political Elite": Lessons from Mosca and Pareto.” *The Journal of Politics* 39, no. 2 (1977): 324–44. <https://doi.org/10.2307/2130054>.
- Zuhrah, Fatimah. “Pergeseran Peran dan Posisi Ulama pada Masyarakat Melayu di Tanjung Pura Kabupaten Langkat.” *Hikmah: Journal of*

@Copyright_Arif Sugitanata

DARI PEMBERONTAKAN HINGGA DIPLOMASI: Menggali Peran Ulama dalam Politik Modern di Indonesia

Islamic Studies 12, no. 1 (2016): 83–106.
<https://doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.58>.